



**BAPPENAS**

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

# e-klipping

*Kumpulan Berita Harian Media Online*

SUBJEK

EKONOMI

Kamis, 25 Mei 2023

**BIRO HUMAS, KEARSIPAN DAN TATA USAHA PIMPINAN**  
**Perpustakaan**  
**2023**

## **Daftar Isi**

1. PEMERINTAH DIMINTA MEWASPADAI UTANG – *Media Online Kompas*
2. KONVERGENSI PEMBANGUNAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 – *Media Online Kompas*
3. PROSPEK CERAH SDGS BONDS – *Media Online Bisnis Indonesia*
4. SURPLUS ANGGARAN YANG TAK SEHAT – *Media Online Bisnis Indonesia*

# Pemerintah Diminta Mewaspadaai Utang

Kendati rasio utang dianggap masih aman, pemerintah perlu mewaspadaai laju kenaikan utang jangka menengah-panjang. Sejumlah fraksi di DPR meminta pemerintah memperhatikan risiko utang.

JAKARTA, KOMPAS — Sempat membengkak akibat pandemi Covid-19, posisi utang Indonesia per April 2023 turun. Kendati rasio utang masih di batas aman, pemerintah diminta tetap mewaspadaai laju kenaikan utang jangka menengah-panjang, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi akhir-akhir ini.

Dokumen APBN Kita edisi Mei 2023 yang dirilis Kementerian Keuangan awal pekan ini menyebutkan, sampai 30 April 2023, posisi utang pemerintah berada di angka Rp 7.849,8 triliun dengan rasio utang 38,15 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Secara nominal ataupun rasio, posisi utang Indonesia turun dibandingkan dengan 31 Maret 2023, ketika rasio utang tercatat 39,17 persen atau Rp 7.879 triliun. Rasio utang juga turun dibandingkan April 2022. Saat itu, rasio utang mencapai 39,09 persen PDB, meski nominal utang bertambah dari posisi Rp 7.040,32 triliun tahun lalu.

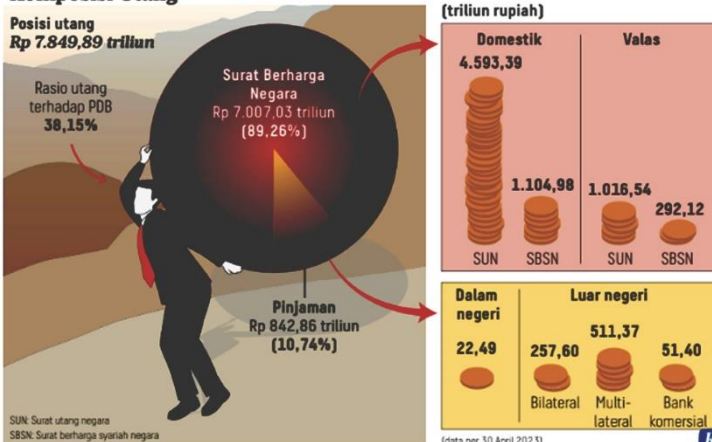
Dengan kondisi itu, posisi utang pemerintah masih di bawah batas aman. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, batas aman (*threshold*) utang pemerintah maksimal 60 persen dari PDB dan defisit APBN maksimal 3 persen dari PDB. Per akhir 2022, defisit fiskal bisa ditekan ke 2,38 persen terhadap PDB.

Dalam laporan APBN Kita, Kemenkeu menyatakan, posisi utang turun akibat pembayaran cicilan pokok utang pada April yang lebih besar ketimbang penerbitan utang baru. Rupiah yang menguat juga berkontribusi pada penurunan utang.

Menurut Wakil Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto, Rabu (24/5/2023), kendati masih di batas aman, pemerintah perlu mewaspadaai laju kenaikan utang jangka menengah-panjang. Batas aman defisit APBN dan rasio utang yang diatur UU Keuangan Negara sudah tidak terlalu relevan untuk mengukur aman tidaknya posisi utang saat ini.

"Kalau hanya mengacu pada dua indikator itu memang utang kita akan selalu dikatakan aman, tetapi kenyataannya lonjakan utang kita cukup besar

## Komposisi Utang



lima tahun terakhir, meski itu karena pandemi," katanya.

Kenaikan utang saat pandemi terjadi di hampir semua negara. Akibat turunnya pendapatan dan naiknya kebutuhan belanja, meski masih di batas aman, rasio utang RI membengkak hingga di atas 40 persen terhadap PDB. Pada 2020, rasio utang terhadap PDB mencapai 38,68 persen. Pada 2021, rasio utang menembus angka tertinggi sejak reformasi, yaitu 41 persen terhadap PDB. Pada 2022, rasio utang turun ke 38,65 persen. Sebagai perbandingan, pada 2019, rasio utang terhadap PDB 29,8 persen.

Menurut Eko, ada beberapa faktor risiko dalam pengelolaan utang. Pertama, profil jatuh tempo utang Indonesia dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo (*average time maturity*/ATM) di kisaran 8 tahun yang aman untuk jangka pendek, tetapi bisa membebani untuk jangka menengah-panjang.

Kedua, laju pertumbuhan ekonomi dan pendapatan negara tak seimbang dengan laju kenaikan utang. Menurut dia, pertumbuhan ekonomi ada di kisaran 5 persen, tetapi pertumbuhan utang 12-14 persen.

"Ini yang membuat pada titik tertentu di masa depan ini bisa jadi risiko," ujar Eko.

## Berhati-hati

Kemenkeu mencatat, pener-

bitan utang baru per akhir April 2023 mencapai Rp 243,9 triliun atau 35 persen dari target tahun ini. Kendati naik dari periode sama tahun lalu, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, hal itu untuk mengantisipasi kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat ataupun suku bunga dalam negeri.

Meski besar di awal tahun, penerbitan SBN akan diupayakan turun, apalagi melihat kinerja APBN yang terjaga di awal tahun. "Jika penerimaan cukup besar, bisa dilakukan penurunan penerbitan SBN sesuai kondisi keuangan kita yang cukup baik pada triwulan I tahun ini," kata Sri Mulyani.

Pemerintah juga tetap berhati-hati mengelola utang, seperti mengoptimalkan sumber pembiayaan dalam negeri dibandingkan utang luar negeri. Komposisi utang per April 2023 didominasi utang domestik (72,88 persen). Sementara berdasarkan instrumen, komposisi utang pemerintah mayoritas berupa SBN yang mencapai 89,26 persen. Hanya 10,74 persen yang dari pinjaman.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto menambahkan, penerbitan SBN di awal tahun dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN. Strategi *front loading* ini kerap dilakukan karena penerimaan di awal tahun biasanya

belum cukup memadai untuk membiayai kebutuhan belanja.

## Jadi sorotan

Isu mengenai utang pemerintah sempat jadi sorotan fraksi-fraksi di DPR saat rapat paripurna mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2024, Selasa (23/5).

Fraksi PDI Perjuangan, misalnya, meminta agar pembiayaan utang tahun depan memperhatikan pengendalian risiko utang serta mengoptimalkan penerbitan SBN di pasar domestik, sementara sumber utang luar negeri lebih baik digunakan sebagai pelengkap.

Fraksi Partai Demokrat meminta agar rasio utang terhadap PDB dijaga di batas aman. Dalam KEM-PPKF 2024, pemerintah menargetkan rasio utang diturunkan ke 38,07-38,97 persen terhadap PDB.

"Transformasi ekonomi pasti butuh kebijakan ekonomi ekspansif, tapi diharapkan kebijakan itu tetap memperhatikan keserasian komposisi aset dan utang, kemampuan bayar utang, bunga utang, dan parameter lain. Kami tidak ingin generasi muda kelak dihadapkan pada kondisi ekonomi yang tidak pasti, serta dililit utang negara yang besar," kata perwakilan Fraksi Demokrat, Rizki Aulia Natakusumah. (AGE)

## RPJPN 2025-2045

# Konvergensi Pembangunan Menuju Indonesia Emas 2045

Visi Indonesia Emas 2045 memerlukan perencanaan pembangunan yang matang. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kementerian PPN/Bappenas berupaya mewujudkannya melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045.

Terdapat lima sasaran yang harus dicapai, yaitu pendapatan per kapita setara dengan negara maju, kemiskinan menuju 0 persen dan ketimpangan berkurang, kepemimpinan dan pengaruh dunia internasional meningkat, daya saing sumber daya manusia (SDM) meningkat, serta intensitas emisi gas rumah kaca menurun menuju *net zero emission*. Namun, juga terdapat tantangan di berbagai bidang untuk mewujudkannya.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 diharapkan menampung mimpi-mimpi besar anak bangsa menyambut usia 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Bagaimana pemerintah merancang RPJPN tersebut menuju Indonesia Emas 2045? Berikut petikan wawancara harian *Kompas* dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa di Jakarta, Rabu (24/5/2023).

*Apa yang sedang dirancang oleh Bappenas untuk Indonesia Emas 2045?*

Rencana pembangunan jangka panjang dibikin setiap 20 tahun. Untuk 20 tahun pertama (2005-2025), sudah kita lakukan. Sekarang, kami diminta menyiapkan RPJPN 2025-2045. Karena 2045 itu 100 tahun kemerdekaan Indonesia, jadi kami juga mempersiapkan itu.

Kami sudah mendapatkan izin prakarsa dari Presiden (Joko Widodo) untuk menyusun RPJPN. Menurut arahan Presiden, RPJPN hendaknya menjadi pedoman bagi calon presiden, calon wakil presiden, dan calon-calon kepala daerah di masa mendatang.

Karena menjadi pedoman, semua perencanaan pembangunan secara nasional itu konvergen. Dengan begitu, pembangunan oleh pemerintah pusat yang dilakukan di daerah disambut dan berjalan beriringan dengan pembangunan pemerintah daerah (pemda).

Kalau keadaan sekarang, ada inisiasi pembangunan dari pemerintah pusat, tetapi pemda punya *interest* lain. Kami berharap ke depan bisa lebih sinkron. Alhasil, akan terbentuk efisiensi anggaran dan pembiayaan serta cara



ADRYAN YOGA PARAMADWITA

Suharso Monoarfa

## Konvergensi Pembangunan

(Sambungan dari halaman 1)

mencapainya pun bisa secara keroyokan atau berbarengan.

Akan tetapi, tetap terbuka peluang kreativitas bagi presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, dan wali kota yang akan datang dalam koridor yang diberikan oleh RPJPN itu. Keadaan dunia itu dinamis. Jadi, kami tidak sedang membuat perencanaan yang membuat Indonesia statis.

RPJPN ini milik bersama. Jangan sampai menganggap itu dilahirkan Bappenas atau pemerintahan Joko Widodo. Ini adalah milik negara dan ada proses politiknya, yaitu undang-undang.

*Berarti rumusan RPJPN ini harus canggih karena sasarannya harus tepat. Bagaimana Bappenas menyiapkan rumusan ini dan apakah sudah melibatkan futurolog?*

Menjelang akhir abad ke-20, para futurolog muncul dengan gagasan-gagasan luar biasa. Yang kita ingat ada Alvin Toffler, Herman Kahn, dan John Naisbitt.

Ada juga film Hollywood tahun 1960 yang memperkirakan pada tahun 2000-an itu kalau kita menelepon sudah bisa lihat orangnya. Tidak perlu lagi kerja di kantor, tapi bisa jarak jauh. Hal itu pun terjadi.

Jadi, benar (melibatkan) futurolog itu. Kami sudah mulai mengajak beberapa futurolog, tapi belum intens berbicara dengan mereka.

Dalam perencanaan, memang beberapa negara menyusun perencanaan jangka panjang. China membuat perencanaan 100 tahun. Amerika Serikat tidak bikin (perencanaan) panjang, tapi mereka punya strategi *goals*, misalnya mengirimkan warganya ke luar angkasa.

*Dalam RPJPN, apakah ada hal-hal yang membangkitkan mimpi anak-anak Indonesia di*

*2045?*

Mimpi itu harus *achievable* (dapat dicapai). Kita punya cita-cita akan menjadi jagoan di *seaplane* karena Indonesia negara kepulauan. Tidak perlu membuat banyak bandara di darat.

Mengapa tidak mengembangkan bandara dan pelabuhan sekaligus? Jadi, ke depan Indonesia bisa jadi salah satu raja *seaplane*. Kita sedang mendorong ke sana.

Publik juga bisa dilibatkan untuk menyumbang mimpi. Menjadi "raja" *seaplane* di dunia merupakan satu mimpi yang harus kita wujudkan. Hal itu rasional di negara kepulauan sebesar ini.

*Tantangan di bidang pendidikan juga besar. Bagaimana mau meningkatkan produktivitas jika pendidikan tidak mendukung?*

Kami mengusulkan perubahan mendasar dalam kurikulum sekolah dasar. Misalnya ada tiga bahasa yang harus dikuasai sejak SD, yaitu bahasa daerah, karena itu budaya dan jati diri sebagai bangsa, bahasa Inggris, dan bahasa *coding*.

Sejalan dengan itu, riset masa depan akan bergerak jauh. Konsolidasi riset sekarang mudah-mudahan bisa dipakai terus. Namun, kita harus punya riset-riset masa depan yang dipilih oleh kita sendiri, seperti riset untuk industrialisasi.

*Bagaimana dukungan asupan makanan untuk membangun SDM di masa depan?*

Ketahanan pangan juga perlu diperhatikan. Daerah-daerah yang menjadi lumbung pangan harus dipertahankan. Namun, ukurannya tidak lagi sebatas beras. Riset terapan dilakukan untuk meningkatkan produktivitas benih dan menjamin kualitasnya, bagaimana mengarah ke pangan organik yang lebih sehat.

(TATANG MULYANA SINAGA)

(Bersambung ke hlm 15 kol 6-7)

Hlm: 1 & 15 - Kolom: Halaman Depan & Umum

## PROSPEK CERAH SDGS BONDS

Bisnis, JAKARTA — Penawaran seri Surat Utang Negara khusus bertema target pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development goals* (SDGs) melalui SDGs Bonds diproyeksi masih cerah pada kali kedua gelang sepanjang tahun ini.

Darul Setiyo  
darul.setiyo@bisnis.com

**D**irektorat Jenderal Pengelolaan Pembayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan menyebut bahwa penawaran seri khusus FRSDG001, SDGs Bonds memiliki tenor 7 tahun dengan kupon 7,375%. Kupon tersebut menjadi yang tertinggi dibandingkan dengan seri lainnya.

Menariknya, penawaran seri ini terbuka bagi investor ritel dan institusi dengan harga unit dijual Rp1 juta.

Ekonom KB Valbury Sekuritas Fikri C. Permana mengatakan penawaran SDGs Bonds menarik dengan kuponnya yang tinggi. Di sisi lain, instrumen surat utang dengan tema khusus ini bisa menjangkau investor yang memiliki perhatian terhadap lingkungan. Tema serupa juga diterbitkan oleh pemerintah melalui Blue Bonds yang mendapat respons positif.

"Prospeknya positif ya karena konsumennya seperti SBN ritel itu milenial, investor yang peduli lingkungan. Likuiditas ritel juga masih bagus yang terlihat pada pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 8%—9%," ujarnya saat dihubungi *Bisnis*, Rabu (24/5).

Lebith lanjut, dia menilai investor dari industri keuangan mulai dari perbankan, manajer investasi, asuransi dan dana pensiun bakal mengincar seri tersebut. Terlebih, asuransi dan dana pensiun memiliki kebutuhan investasi pada instrumen Surat Berharga Negara (SBN) sebesar 30% sehingga akan berupaya memenuhi kebutuhan investasi melalui seri perdana itu.

Sementara itu, bank dipertarikan turut terlibat dengan naiknya kebutuhan pendanaan hijau dan keberlanjutan. Hal itu akan menggerak penawaran masuk dalam gelang. Sebagai gambaran, pada gelang sebelumnya akhir Januari 2023, penawaran masuk gelang tersebut mencapai Rp6,17 triliun dan terserap Rp4,55 triliun di antaranya.

"Sekarang bisa dimenangkan bisa



**Pasar akan lebih kondusif dan inflasi kami proyeksi terus turun.**



sampai Rp10 triliun. Bisa sampai Rp15 triliun karena minat pasar surat utang lagi tinggi-tingginya."

Adapun, kondisi pasar surat utang pada pekan depan bakal dibayangi oleh kelanjutan batas utang pemerintah Amerika Serikat. Begitu juga dengan ekspektasi kenaikan suku bunga acuan Federal Reserve pada Juni 2023 sebesar 25 basis poin (bps). Menurutnya, sentimen negatif akan dilmbangi dengan sentimen positif dari kinerja makroekonomi Indonesia.

"Di dalam negeri, hal positif dari surplus fiskal. Ada surplus neraca perdagangan juga bagus. Mendorong permintaan lebih kuat," katanya.

Senada, Kepala Ekonom BCA David Sumual mengatakan kupon seri FRSDG001 menarik karena melampaui imbal hasil Surat Utang Negara (SUN) acuan tenor 10 tahun yang masih bergerak pada rentang 6,3%—6,4%.

"Ini lebih tinggi (kuponnya) dan ini kan tematik. Ada fund khusus yang fokus ke situ (keberlanjutan)

dan berkembang terus di dalam dan luar negeri," katanya.

Investor yang tertarik dengan instrumen tersebut, katanya, lebih luas dibandingkan dengan instrumen SUN pada umumnya. Alasannya, saat ini akses investor ritel terbuka misalnya melalui perbankan yang kini menawarkan pembelian langsung melalui aplikasi.

"Sekarang udah makin meluas karena teknologi juga, bisa semua kalangan apalagi yang *concern* dengan keberlanjutan."

Manajer Investasi, katanya, berpotensi membeli seri tersebut untuk dibungkus menjadi reksa dana. Lebih dari daya tariknya, menurutnya, hal yang lebih penting untuk memastikan bahwa instrumen tersebut terus ditawarkan dan tersedia di pasar.

"Mudah-mudahan *sustained*, nanti ada lagi penawarannya. Jadi berkala gitu," katanya.

Minat tinggi investor terhadap seri ini pun ditunjang dengan kondisi pasar surat utang yang cenderung minim sentimen negatif.

Satu-satunya sentimen negatif bagi pasar surat utang yakni pagu utang pemerintah Amerika Serikat. Pasar menempatkan isu ini yang krusial terhadap pergerakan pasar karena pada 2011 pagu utang pemerintah Negeri Paman Sam berlangsung lama yakni sekitar 3 bulan dan membuat pasar terkoreksi.

"Pasar akan lebih kondusif dan inflasi kami proyeksi terus turun," katanya.

Direktur Panin Asset Management Rudyanto mengatakan prospek gelang SUN seri SDGs menarik sejalan dengan tingginya kebutuhan obligasi berbasis SDGs. Alasannya, terdapat aturan yang mewajibkan partisipasi pada instrumen berbasis SDGs.

"Terlepas dari besaran kupon, untuk yang masih belum *comply* akan berupaya untuk memenuhinya. Yield nomor 2," katanya.

Namun, dia menyebut perlu waktu bagi manajer investasi untuk mengalokasikan dana di seri tematik ini. Menurutnya, manajer investasi membutuhkan seri yang ramal diperdagangkan

di pasar.

"*Concern* lebih ke likuiditas, mengingat masih baru dan investornya cenderung *buy and hold*, bisa saja di *secondary market* kurang likuid," katanya.

Direktur Batavia Prosperindo Aset Manajemen Eri Kusnadi menyebut untuk instrumen surat utang berenor 7 tahun, seri FRSDG001 sangat menarik dengan kupon 7,375%.

Menurutnya, kupon tinggi menjadi cara pemerintah untuk menarik minat investor. Namun, dia tak memberikan komentar lebih lanjut tentang daya tarik instrumen tersebut sebagai portofolio perusahaan.

"Menarik atau tidaknya untuk dikoleksi tergantung kebutuhan portofolio masing-masing *fund* kami," a

| KINERJA APBN 2023 |

## SURPLUS ANGGARAN YANG TAK SEHAT

Performa fiskal sepanjang tahun berjalan 2023 yang berakhir 30 April memaparkan data positif, dengan catatan surplus yang cukup memuaskan. Akan tetapi, data penerimaan yang lebih jumbo dibandingkan dengan pengeluaran anggaran negara tersebut belum bisa dibalang sehat.

Tegar Arief  
tegar.ariet@bisnis.com

**T**ak bisa dimungkiri, surplus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 sebesar Rp234,7 triliun atau 1,12% terhadap produk domestik bruto (PDB) merupakan data yang mengembirakan.

Artinya, pemerintah mampu mengelola fiskal dengan cukup hati-hati pada tahun konsolidasi yang mewajibkan defisit di bawah 3% terhadap PDB.

Apalagi, capaian dan pertumbuhan penerimaan terutama cukup memujakan. (Lihat *Infografik*).

Namun, takala dicermati lebih dalam, ada ketimpangan di dalam dompet negara, yakni tingginya kesenjangan antara pertumbuhan penerimaan dan belanja yang dieksekusi pemerintah.

Sekadar membandingkan, total pertumbuhan pendapatan negara per 30 April 2023 hanya 17,3% (*year-on-year*/YoY), sedangkan belanja negara hanya naik tipis yakni 2% (YoY).

Data menengangkan juga tersaji dari sisi belanja pemerintah pusat, yang per akhir bulan lalu hanya naik 2,9% (YoY) sekaligus menjadi angka pertumbuhan terendah sejak 2021 slam atau periode awal pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19.

Becermin pada data tersebut, tak berlebihan apabila kalangan ekonom memandang ada desain untuk menghemat belanja demi memuluskan APBN ke

parkir di garis finis konsolidasi.

Menahan defisit memang menjadi prioritas setelah dalam 3 tahun terakhir ruang fiskal tercabik oleh krisis akibat pandemi Covid-19, tekanan inflasi, hingga dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Meski demikian, hal itu tak bisa dijadikan dasar bagi pemangku kebijakan untuk menahan belanja. Apalagi ekonomi belum sepenuhnya membaik pada tahun ini.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal, mengatakan kondisi APBN apabila dilihat dari sisi pendapatan negara bisa dibalang sangat sehat.

Akan tetapi, ketika disandingkan dengan realisasi belanja yang teramat cekak, surplus fiskal sepanjang tahun berjalan masih patut dikritisi.

"Ini menjadi tanda tanya karena pertumbuhan belanjanya berbanding terbalik dengan penerimaan negara," katanya kepada *Bisnis*, Rabu (24/5).

Menurutnya, kebijakan fiskal idealnya dijalankan dengan konsisten dalam rangka menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional yang pada kuartal 1/2023 tumbuh 5,03%.

Terlebih, realisasi produk domestik bruto (PDB) pada periode Januari-Maret tahun ini masih mengindikasikan rapuhnyanya pemulihan ekonomi domestik.

Musabahnya, laju ekonomi mendorong oleh faktor eksternal yakni kinerja ekspor yang terpacu oleh tingginya harga komo-

ditas sumber daya alam (SDA), terutama minyak dan gas.

Adapun, dua sektor yang sepanjang sejarah konsisten menopang ekonomi, yakni konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) alias investasi, pertumbuhannya masih di bawah prapandemi Covid-19.

Dalam konteks inilah menurut Faisal belanja negara menjadi krusial, yakni sebagai instrumen penguat daya beli sehingga mendorong konsumsi rumah tangga.

Sepanjang belanja negara diprioritaskan pada sektor yang produktif, maka struktur ekonomi pun jauh lebih tangguh karena ditopang oleh potensi di dalam negeri.

"Perlu dorongan kebijakan fiskal termasuk belanja APBN yang kuat, apalagi masih ada *scarring effect* pandemi Covid-19, gelombang PHK [pemutusan hubungan kerja], dan konsumsi melambat," jelasnya.

### PENGHAPUSAN PPKM

Momentum lain yang perlu direspons oleh politik anggaran negara adalah ditidakkannya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang dapat memacu konsumsi.

Apabila kondisi tersebut tidak diimbangi dengan belanja negara yang juga agresif, maka Indonesia berisiko kehilangan kesempatan untuk memperbaiki laju ekonomi dengan struktur yang lebih kokoh.

Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI

**“**Perlu dorongan kebijakan fiskal termasuk belanja APBN yang kuat, apalagi masih ada *scarring effect* pandemi Covid-19, gelombang PHK, dan konsumsi melambat.**”**

Teuku Riefky, berpendangan meskipun permintaan domestik kuat, pelemahan ekonomi global mulai menimbulkan risiko terhadap neraca eksternal Indonesia seperti yang terlihat pada penurunan ekspor.

Sementara itu, pada saat bersamaan aktivitas impor secara keseluruhan mencatatkan penurunan.

"Kondisi ini dapat memberikan indikasi bahwa kegiatan ekonomi sedikit melambat," katanya.

Aksi lamban belanja negara itu juga mendapatkan sorotan dari Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Menurut Ketua Banggar Saïd Abdullah, secara umum belanja negara terkelola cukup sehat.

Persoalannya, kementerian dan lembaga (K/L) serta pemerintah daerah masih 'pelit' dalam menyerap anggaran belanja.

Saïd berpendapat, memasuki kuartal kedua total belanja negara idealnya bisa terealisasi di atas 25% dari pagu.

"K/L serta pemerintah daerah harus lebih progresif lagi, agar memiliki daya ungkit ke perekonomian lebih besar," katanya. Kendati ditimpa kritik, otoritas fiskal mengumbar sejuta kata pembelaan yang menegaskan realisasi belanja sejauh ini telah dijalankan dengan maksimal dan hati-hati, serta memiliki efek besar pada masyarakat.

Menteri Keuangan Sri Muliyil Indrawati, mengatakan belanja APBN diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas dan peran sebagai *shock absorber* dalam menghadapi ketidakpastian.

Sejalan dengan itu, seperti pada belanja APBN digunakan untuk transfer ke daerah dalam rangka perbaikan layanan publik dan pemerataan ekonomi yang berkeadilan.

"Ini tentu akan meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi dan kita berharap juga akan meningkatkan produktivitas dari daerah," ujarnya.

Mengetala defisit anggaran dengan sangat cermat adalah tuntutan yang tak bisa diwarar. Maklum, amanat itu tertuang di dalam UU No. 2/2020 yang menjadi payung hukum penanganan krisis pandemi Covid-19.

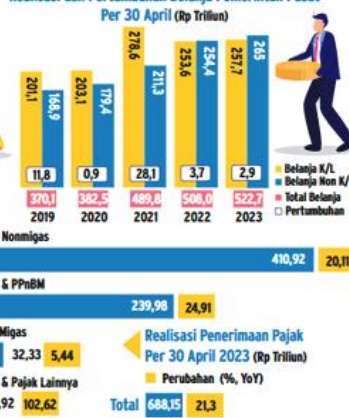
Namun, bukan berarti tuntutan konsolidasi itu harus mengorbankan belanja yang sejatinya memiliki efek sangat besar dan jangka panjang terhadap ekonomi nasional. □

## BELANJA TERUS DIHEMAT

Memasuki kuartal kedua, postur fiskal berhasil mencatatkan surplus. Akan tetapi, performa ciamik itu harus mengorbankan belanja yang terkesan dihemat.



Realisasi dan Pertumbuhan Belanja Pemerintah Pusat



Realisasi APBN 2023 Per 30 April (Rp Triliun)

Uraian	Realisasi (Rp Triliun)	Pertumbuhan (%) YoY
<b>A. PENDAPATAN NEGARA</b>	<b>1.000,5</b>	<b>17,3</b>
I. Perpajakan	782,7	15,8
1. Pajak	688,1	21,3
2. Bea Cukai	94,5	-12,8
II. PNBP	217,8	22,8
<b>B. BELANJA NEGARA</b>	<b>765,8</b>	<b>2,0</b>
I. Pemerintah Pusat	522,7	2,9
1. Belanja K/L	257,7	1,6
2. Belanja Non K/L	265,0	4,1
II. Transfer ke Daerah	243,1	0,3
<b>C. KESEIMBANGAN PRIMER</b>	<b>374,3</b>	<b>69,7</b>
<b>D. SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>234,7</b>	<b>128,5</b>
% terhadap PDB	1,12	-
<b>E. PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>223,9</b>	<b>56,3</b>